



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

**Siwalima, 27 September 2016**

## **Tanpa Tersangka Baru**

Penyidikan kasus dugaan korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 senilai Rp 2,2 miliar di Kabupaten SBB mentok. Mantan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten SBB, Ronny Dirk Rumatu menjadi tersangka tunggal. Tak ada lagi tanda-tanda akan ada penambahan tersangka.

Dugaan keterlibatan sejumlah pihak diantaranya Bupati SBB saat itu, Jacobus F Puttileihalat tak serius diusut. Kejati Maluku hanya rajin membangun wacana, tetapi tak tindaklanjuti.

Bob, sapaan akrab Jacobus Puttileihalat disebut-sebut yang mengotaki pencairan dana BTT senilai Rp 2,2 miliar. yang akhirnya bermasalah. Tetapi saat diperiksa 6 April 2016 lalu, Bob, menyangkalinya. Bob justru menuding anak buahnya Ronny Rumatu yang kala itu menjabat Kadis PPKAD, memalsukan stempel bupati, memo dan tanda tangannya untuk mencairkan dana BTT

Pasca pemeriksaan Bob tersebut tak ada langkah lanjutan dari jaksa. Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, tersangka baru masih dalam pengembangan. Itu...itu saja pernyataan yang dilontarkan Korps Adhyaksa.

Kejati Maluku sendiri tak percaya dengan keterangan Bob. Karena itu, tanda tangannya akan diuji di laboratorium forensik. Namun lagi-lagi, hanya wacana tanpa realisasi. Artinya, Kejati Maluku tak serius untuk mengembangkan penyidikan kasus BTT SBB untuk menjerat tersangka baru. Ronny Dirk Rumatu hanya menjadi tumbal.

Selain Bob, nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten SBB, Muhammad Nasir Raharusun juga disinyalir terlibat. Jaksa menemukan bukti puluhan juta rupiah BTT masuk ke rekeningnya. Saat diperiksa, Selasa 28 Juni 2016 lalu, Muhammad Nasir Raharusun mengaku tidak mengetahui dari mana asal uang itu. Namun ia berjanji untuk mengembalikannya ke kas negara melalui Kejati Maluku. Tetapi hingga kini tidak direalisasikan. Anehnya, tak ada langkah tegas dari jaksa. Jaksa hanya main gertak dengan melempar isu, dan membiarkannya berkembang liar tanpa tindakan hukum.

Bukan hanya di kasus BTT, tetapi Bob juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos tahun 2011 senilai Rp 11.632.114.743. Dua orang dijerat Kejati Maluku yaitu, mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBB, DJ Kaisupy dan bendaharanya Zamrud Tatuhey. Namun, lagi-lagi Bob lolos.



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

Saat ini Bob masuk bidikan jaksa dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun 2007-2009. Ia diduga terlibat dalam sejumlah proyek yang merugikan negara Rp 2 miliar lebih.

Kasus ini diusut tim Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak tahun 2011. Setelah melalui proses panjang tim menemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga dinaikan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Nomor: Print-194/F.d.1/12/2011 tanggal 20 Desember 2011.

Untuk mempercepat penuntasan kasus ini, Kejagung kemudian melimpahkan penanganannya sejak Agustus 2016 kepada Kejati Maluku. Atas instruksi Kejagung, Kepala Kejati Maluku Yan S Maringka lalu mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor Print 12/S.1/F.d/1/08/2016. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Victor Saut ditunjuk memimpin tim tersebut. Kita berharap Kejati Maluku serius mengusut kasus ini secara profesional. Tidak ada yang menjadi tumbal untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Siapapun yang terbukti harus dilibas. (\*)